

# TOPONIMI RUPABUMI DI KABUPATEN LANGKAT

## TOPONYMY TOPOGRAPHIC FEATURES IN LANGKAT DISTRICT

**Sahril  
Yulia Fitra  
Agus Mulia**

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara  
Jalan Kolam (Ujung) Nomor 7 Medan Estate  
oksahrilmelayu@ymail.com

Tanggal naskah masuk 28 Oktober 2015  
Tanggal akhir penyuntingan 10 Desember 2015

### *Abstract :*

*Standardization of topographical names has been set up through Pepres No. 112/ 2006 and Permendagri No. 39/2008. The naming, naming both themselves and the naming of topographical strongly associated with language, culture and local history. The UN requires that the naming of topographical using local languages. Langkat consists of 23 districts with 272 villages. Based on the number of villages, researchers analyzed with reference to the naming of topographical topographical naming guidelines. The important thing is set in toponymy is the standardization of the procedure of writing the name of the geographical element. By default, the name of the geographical element consists of two parts: a generic name and a specific name. Among the 272 names of villages were analyzed only 68 (25%) village right under the guidelines of the standardization of topographical. Geographic elements and specific elements, there were 83 (30.51%) villages that use generic element names relating to geographic elements. 63 (23.16%) village by the name of the specific elements related to the adjective. 29 name of the village that use specific element with a direction of the wind and others. 12 name of the village that use specific elements of a good number are writing, numbers, and letters. The use of language, found writing the name of the village that does not refer to the guidelines for the standardization of topographical, geographical element should be written as a series with generic elements.*

*key word: toponymy, topographical, village name*

### *Abstrak :*

*Pembakuan nama rupabumi telah diatur melalui Pepres No. 112/2006 dan Permendagri No. 39/2008. Penamaan, baik penamaan diri maupun penamaan rupabumi sangat terkait dengan bahasa, budaya, dan sejarah setempat. PBB mewajibkan penamaan rupabumi menggunakan bahasa lokal. Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan dengan 272 desa. Berdasarkan jumlah desa tersebut, peneliti menganalisis penamaan rupabumi dengan mengacu pada pedoman penamaan rupabumi. Hal penting yang diatur dalam toponimi adalah pembakuan tata cara penulisan nama unsur geografis. Secara baku, nama unsur geografis terdiri atas dua bagian yaitu nama generik dan nama spesifik. Di antara 272 nama desa yang dianalisis hanya 68 (25%) desa yang benar menurut pedoman pembakuan rupabumi. Unsur geografis dan unsur spesifik, terdapat 83 (30,51%) desa yang menggunakan nama unsur generik yang berkaitan dengan unsur geografis. 63 (23,16%) desa yang menggunakan*

*nama unsur spesifik yang berkaitan dengan kata sifat. 29 nama desa yang memakai unsur spesifik dengan mata angin dan penunjuk arah lainnya. 12 nama desa yang menggunakan unsur spesifik bilangan baik bersifat tulisan, angka, dan huruf. Penggunaan bahasa, ditemukan penulisan nama desa yang tidak mengacu pada pedoman pembakuan rupabumi, seperti unsur geografis harus ditulis serangkai dengan unsur generiknya.*

*Kata kunci: toponimi, rupabumi, nama desa*

## 1. Pendahuluan

### a. Latar belakang

Begitu manusia lahir di bumi, properti yang pertama diberikan oleh orang tuanya adalah “nama diri” (*antroponim*), karena dengan nama ini mulailah terbangun suatu jaringan komunikasi antara orang tua dengan anaknya sepanjang masa. Properti kedua yang melekat pada antroponim adalah “tempat lahir (*toponim*). Kedua nama, yaitu nama diri dan tempat lahir akan melekat terus pada setiap individu sampai meninggal dan dipakai untuk identitas diri, baik dalam Kartu Penduduk, SIM, Paspor, dan semua bukti identitas diri lainnya, termasuk di batu nisannya. Orang mengatakan kita dapat kehilangan apa saja, harta benda, dll, tetapi tidak nama diri dan tempat lahir.

Begitu manusia mendiami suatu wilayah di muka bumi, maka manusia pun memberi nama kepada semua unsur-unsur geografi, seperti nama untuk sungai, bukit, gunung, lembah, pulau, teluk, laut, selat, dsb. yang berada di wilayahnya atau yang terlihat dari wilayahnya. Bahkan juga manusia memberi nama pada daerah yang ditempatinya, seperti nama pemukiman (seperti nama *real estate*), nama desa, nama kampung, nama *huta* atau nama *nagari*, dan seterusnya sampai dengan nama-nama kota. Tujuan memberi nama pada unsur geografi adalah untuk identifikasi atau acuan dan sebagai sarana komunikasi antar sesama manusia. Dengan demikian nama-nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah pemukiman manusia (Rais, 2006:2 dan Rais, 2005:68).

Manusia yang bermukim pertama kali di suatu wilayah tentunya memberi nama pada unsur-unsur geografik di lingkungannya. Nama diberikan berdasarkan apa yang dilihatnya, seperti pohon-pohonan

atau buah-buahan yang dominan di wilayah tersebut. Nama-nama generik dari unsur geografi pun juga menarik untuk dipelajari karena dari nama generik tersebut dapat ditelusuri suku bangsa yang pertama kali mendiami wilayah tersebut dan menyebut nama generik dari unsur geografik dalam bahasanya. Dengan kata lain, nama unsur geografi bukan hanya sekadar nama, tetapi di belakang nama tersebut adalah sejarah yang panjang dari pemukiman manusia (Kadmon, 2000).

Mengenai pembakuan nama rupabumi ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006<sup>1</sup>. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan (Perpres No. 112/2006).

Penamaan, baik penamaan diri maupun penamaan rupabumi sangat terkait dengan bahasa, budaya, dan sejarah setempat.<sup>2</sup>PBB mewajibkan penamaan rupabumi menggunakan bahasa lokal untuk mengekalkan sejarah migrasi penduduk dan jati diri penduduk setempat.<sup>3</sup> Pemahaman mengenai keanekaragaman bahasa di Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung upaya pelacakan nama unsur

<sup>1</sup>Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

<sup>2</sup>Lihat Indonesia. 2003. *Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri.

<sup>3</sup>Lihat Indonesia. 1992. *Gazetteer Nama-Nama Pulau dan kepulauan di Indonesia*. Bakosurtanal Dokumen No. 26/1992.

(generik) dalam berbagai bahasa daerah.<sup>4&5</sup> Hal ini secara tidak langsung turut membantu penggunaan nama lokal berdasarkan bahasa daerah masing-masing. Selain itu pelacakan arti dan asal-usul dari nama spesifik yang diberikan penduduk setempat juga membantu melestarikan warisan budaya setempat.<sup>6</sup>

## b. Masalah

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: berapa besar jumlah penamaan desa yang mengacu pada pedoman penamaan rupabumi di wilayah Kabupaten Langkat? dan bagaimana unsur generik yang menerangkan dan menggambarkan kekhasan toponimi rupabumi di Kabupaten Langkat?

## 2. Metodologi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Langkat, pada bulan Januari--Juli 2015. Sumber data dalam penelitian ini adalah nama-nama rupabumi yang telah ada di wilayah Kabupaten Langkat. Wilayah ini terdapat 23 kecamatan dan 272 desa.<sup>7</sup>

Data dalam penelitian ini berupa toponimi rupabumi yang berwujud teks tulis dan teks lisan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik catat. Setelah mencatat semua toponimi rupabumi di Kabupaten Langkat, selanjutnya peneliti menganalisis toponimi rupabumi tersebut.

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah model analisis interaktif. Menurut Sutopo (2002:96) reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam

penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dirasa kurang mantap, karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.

## 3. Landasan Teori

### a. Toponimi

Menurut (Zuhdi, 2013:9), sejarah toponimi dimulai bersamaan dengan dikenalnya peta dalam peradaban manusia yang dimulai pada zaman Mesir kuno. Untuk memberikan keterangan (nama) pada unsur yang digambarkan pada peta diperlukan suatu usaha untuk 'merekam' dari bahasa verbal (lisan) ke dalam bentuk tulisan atau simbol. Sejarah mencatat nama-nama Comtey de Volney (1820), Alexander John Ellis (1848), Sir John Herschel (1849) dan Theodore W. Erersky (1913) yang terus berusaha untuk membakukan proses penamaan unsur geografis pada lembar peta melalui berbagai metode. Pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNCSGN)<sup>8</sup> di bawah struktur Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC)<sup>9</sup>.

<sup>8</sup>Organisasi ini dibentuk berdasarkan Resolusi UN Economic and Social Council (UN-ECOSOC) No. 715 A (XXVII) tgl. 23 April 1959 dan Resolusi Nomor 1314 (XLIV) tgl. 31 Mei 1968 serta keputusan yang diambil oleh Council pada pertemuannya ke-1844 tgl. 4 Mei 1973, untuk mendukung usaha standarisasi nama geografik pada tingkat nasional dan internasional. Indonesia masuk dalam Divisi Asia, South-East and Pacific, South-West, yang terdiri dari selain negara-negara Asean, juga Australia, New Zealand, Papua Nugini, Salomon dan Fiji. Lihat (Rais, t.t.).

<sup>9</sup> Lihat Raper, P.E. (Ed). 1996. *United Nations Documents on Geographical Names*. Names Research Institute CAUSE. Pretoria.

<sup>4</sup>Lihat Gouvernementsbesluit No. 50.1928. *Lijst van de Voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel*. Landsdrukkerij, Weltevreden.

<sup>5</sup>Lihat juga Subroto, D. Edi. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: UNS Press.

<sup>6</sup>Lihat Indonesia.1987. *Daftar Pulau-Pulau Indonesia*. Pusat Survei dan Pemetaan ABRI.

<sup>7</sup>Lihat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat 2010.

Lembaga ini dalam konferensinya mengeluarkan resolusi penting, yaitu: 'tiap negara harus membentuk suatu lembaga nasional yang bertanggung jawab akan kegiatan penamaan unsur-unsur geografis, termasuk prosedur baku dan resmi, mempublikasikan dalam peta dan *gazetir* secara nasional dan internasional serta terus menjaga kekinian informasi tersebut secara berkesinambungan'. Saat ini, realisasi resolusi ini sudah dilaksanakan di negara lain misalnya di Amerika Serikat melalui *US Board of Geographical Names*<sup>10&11</sup>, Selandia Baru<sup>12</sup> melalui *New Zealand Geographic Board* atau *Nga Pou Taunaha O Aotearoa* (Subowo, 2013:12).

### b. Toponimi di Indonesia

Kegiatan toponimi di Indonesia boleh dikatakan tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya di dunia melalui partisipasi aktif dalam UNGEGN dan juga peran Prof. I Made Sandy yang telah merintis atlas nasional Indonesia. Indonesia pernah sukses menyelenggarakan kursus toponimi internasional pada tahun 1982 di Cisarua dalam koordinasi UNGEGN. Tetapi harus diakui secara umum dan kelembagaan, kondisinya masih 'samar-samar'. Kegiatan toponimi masih terbatas dalam kegiatan kecil dalam masing-masing instansi yang berkaitan dengan kegiatan spasial (Matindas, 2013:11).

Lembaga toponimi nasional sebagai salah satu resolusi dari UNSCGN sudah saatnya direalisasikan untuk mengantisipasi berbagai tantangan ke depan. Berkaca pada negara yang telah membentuk lembaga ini, sebaiknya lembaga ini dikoordinir oleh Departemen Dalam Negeri yang

beranggotakan ahli perpetaan, sejarawan, antropolog, dan ahli bahasa (Soenhadi, 2013:10).

### c. Kaidah penulisan nama rupabumi

Hal penting yang diatur dalam toponimi ini adalah pembakuan tata cara penulisan nama unsur geografis. Secara baku, nama unsur geografis terdiri atas dua bagian yaitunama generik dan nama spesifik. Yang dimaksud dengan nama generik adalah nama yang menggambarkan bentuk dari unsur geografis tersebut, misalnya sungai, gunung, kota, dan unsur lainnya. Sedangkan nama spesifik merupakan nama diri (*proper name*) dari nama generik tersebut yang juga digunakan sebagai unit pembeda antarunsur geografis. Nama spesifik yang sering digunakan untuk unsur geografis biasanya berasal dari kata sifat, misalnya 'baru', 'jaya', 'indah', 'makmur' atau kata benda yang bisa mencerminkan bentuk unsur tersebut, misalnya 'batu', 'candi' dan lain sebagainya (Rais, 2005).

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2008, kaidah penulisan nama geografis secara umum mengikuti kaidah penulisan yang baku dalam bahasa Indonesia. Secara umum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kaidah penulisan yang berkaitan dengan nama generik dan nama spesifik; dan kaidah penulisan yang berkaitan dengan transformasi dari bahasa daerah dan asing ke bahasa Indonesia. Kaidah penulisan nama geografis yang berkaitan dengan nama generik dan nama spesifik adalah selalu ditulis secara *terpisah* dan dalam *huruf kapital*. Sebagai contoh adalah penulisan *Sungai Saddang* (sebuah sungai di Sulawesi Selatan), sungai adalah nama generik, sedang *saddang* adalah nama dari sungai tersebut.

Apabila suatu nama tempat, misalnya kota, dimulai dengan nama generik yang bukan nama tempat, maka ditulis sebagai *satu kata*, misalnya *Bandarlampung* dan *Tanjungpinang*. Nama spesifik ditulis sebagai *satu kata* apabila terdiri atas: pengulangan kata (misalnya *Bagansiapiapi*); terdiri atas dua kata benda (misalnya

<sup>10</sup> Lihat US Board on Geographic Names. 1997. *Principles, Policies, and Procedures: Domestic Geographic Names*. Department of the Interior. Washington DC.

<sup>11</sup> Lihat juga US Department of the Interior 1987. *US Geodata: Geographic Names Information System – Data User Guide 6*. USGS. Reston, Virginia.

<sup>12</sup> Lihat New Zealand Geographic Board on Geographical Names. 1991. *Proceedings of South Pacific Place Names Conference*. Wellington Nove, ber 5-7 1990.

*Pagaralam*); terdiri atas kata benda diikuti nama generik (misalnya *Pagargunung*); terdiri atas tiga kata, masing-masing dua nama generik diikuti dengan kata sifat atau kata benda (misalnya: *Muarabatangangkola*, muara dan batang adalah nama generik dari unsur *hidrografis* dan angkola adalah nama benda); terdiri atas empat kata atau lebih (misalnya *Purbasinombamandalasena*).<sup>13</sup>

Tetapi apabila suatu nama spesifik itu diikuti dengan kata sifat, bilangan atau penunjuk arah, maka ditulis *terpisah*, misalnya *Kalimantan Tengah, Koto Ampek* (ampek adalah empat dalam bahasa Minang).

Bahasa daerah merupakan salah satu faktor penting dalam tata cara penulisan nama unsur geografis. Hal ini berkaitan dengan arti dari 'istilah' bahasa daerah tersebut yang mungkin tidak diketahui secara umum. Tentu saja ini merupakan tantangan bagi setiap 'pemilik' istilah tersebut untuk mensosialisasikan sehingga bisa terwujud 'saling pengertian' dalam bangsa yang besar ini. Istilah bahasa daerah tersebut bisa dijumpai dalam nama generik maupun nama spesifik. Misalnya untuk nama generik, beragam istilah digunakan dari Sabang sampai Merauke untuk mendeskripsikan sungai, misalnya *krueng* atau *ie* (Aceh), *ci* (Sunda), *bengawan* atau *kali* (Jawa), *batang* atau *way* (daerah Sumatera), *je'ne* dan *salo* (daerah Sulawesi).<sup>14</sup>

Contoh paling sederhana adalah penulisan *Sungai Ciliwung*. Selintas tata cara penulisannya benar karena sudah ditulis terpisah dan menggunakan huruf kapital, tetapi salah dari segi Toponimi. Sungai ini terdapat di daerah Jawa Barat, dan sebagian besar daerah ini didiami oleh etnis Sunda yang berbahasa Sunda, dan dalam bahasa Sunda dikenal istilah *ci* untuk mendeskripsikan suatu unsur yang berbentuk air. *Ci* dalam pengertian 'Ci-liwung' adalah suatu nama unsur yang artinya sungai, sedang *liwung* adalah nama spesifik dari 'ci'

atau sungai tersebut. Sehingga penulisan yang benar dari sungai tersebut adalah 'Ci Liwung' atau 'Sungai Liwung', tetapi yang sudah dibakukan adalah 'Ci Liwung'. Hal ini untuk menghilangkan kesalahan pengulangan makna dari unsur tersebut. Sama halnya jika menunjuk suatu gunung di daerah Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama *Gunung Bulusaraung*, padahal *bulu* adalah gunung dalam bahasa setempat. Sehingga yang benar adalah 'Bulu Saraung', yaitu sebuah gunung yang berbentuk seperti topi petani (caping atau saraung dalam bahasa lokal) jika dilihat dari jauh.

Lhokseumawe atau Lhok Seumawe? Keduanya benar dari segi tata cara penulisan, tetapi berbeda dari segi makna. *Lhok* dalam bahasa Aceh adalah teluk, sehingga bisa dijadikan sebagai nama generik. Sehingga apabila nama generik digunakan bersama kata lain untuk dijadikan nama spesifik, maka harus ditulis terpisah. Misalnya, apabila digunakan untuk menunjuk suatu unsur pemukiman yaitu 'kota' (nama generik) maka harus ditulis dalam satu kata menjadi *Lhokseumawe* sehingga yang benar adalah Kota Lhokseumawe. Tetapi jika ditulis *Lhok Seumawe*, maka yang dimaksud adalah suatu teluk (nama generik) yang bernama *Seumawe* (nama spesifik).

Selain itu toponimi juga mengatur penulisan nama geografis yang dipengaruhi oleh bahasa asing misalnya *Pelabuhan* (nama generik) Tanjungperiuk (nama spesifik), bukan Pelabuhan Tanjung Priok; *Malborough* menjadi *Malioboro* dan *Buitenzorg* menjadi *Bogor* dan lain sebagainya.

#### d. Standarisasi nama geografik di Indonesia

Penamaan unsur-unsur geografi Indonesia sangat tidak terorganisir, terutama ketika para transmigran yang pindah ke luar Jawa juga membawa nama tempat asalnya menjadi tempat nama desa baru dan menghilangkan nama desa setempat yang mempunyai arti budaya penting.

Indonesia pernah gagal untuk memperoleh pengakuan pada Sidang

<sup>13</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

<sup>14</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Konperensi PBB ke-5 di Montreal tahun 1987 bahwa jumlah pulau kita telah bertambah dari 13.667 buah menjadi 17.508 buah dan respons PBB agar Indonesia menyampaikan bukan jumlah pulau tetapi nama-nama pulau sebagai kegiatan administrasi pemerintahan yang tertib dan dilaporkan kegiatan penamaan unsur geografi ini pada sidang UNCSGN yang diadakan setiap lima tahun.<sup>15&16</sup>

#### e. Pedoman pembakuan nama unsur geografi di Indonesia

Tiap nama unsur geografi di Indonesia terdiri atas dua bagian: nama generik, yaitu sebutan untuk unsur tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal/etnis serta nama spesifik atau nama diri dari unsur tersebut. Menurut Perpres Nomor 112/2006 dan Pemandagri Nomor 39 Tahun 2008, kaidah penulisan nama geografis, ada enam pedoman, yaitu: (1) dalam menulis nama unsur geografi ditulis terpisah antara nama generik dan nama spesifiknya; (2) nama spesifik dan nama generik untuk nama geografis ditulis dalam satu kata; (3) jika suatu nama spesifik ditambah dengan kata sifat di belakangnya atau penunjuk arah, maka ditulis terpisah; (4) jika nama spesifik yang terdiri atas kata berulang dan nama spesifik terdiri atas dua kata benda, ditulis sebagai satu kata; (5) nama spesifik terdiri atas kata benda diikuti dengan nama generik dan nama spesifik yang terdiri atas tiga kata,

<sup>15</sup> Lihat Tichelaar, T.R. (Ed.).1990. *Proceedings of the Workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia*.Bakosurtanal UNGEGN Workshop. Bako Dok. No.07/1990.

<sup>16</sup> Lihat beberapa referensi, seperti: (1) United Nations. 1986. *World Cartography Volume XVIII: Standardization on Geographical Names*. UN Publications.New York; (2) United Nations. 1992. *Sixth UN Conference on the Standardization of Geographical Names. Vol. 1.Report of the Conference*.UN Publications; (3) United Nations. 1998. *Seventh UN Conference on the Standardization of Geographical Names Vol. I: Report of the Conference*. UN Publications; dan (4) United Nations. 1986. *Glossary No. 330/Rev.1: Technical Terminology Employed in the Standardization of Geographical Names (in six languages)* UN Secretariat.

masing-masing dua nama generik diikuti dengan kata sifat atau kata benda, maka ditulis sebagai satu kata; (6) nama spesifik terdiri atas empat kata atau lebih, disarankan tidak memakai nama yang panjang.

#### 4. Analisis Toponimi Rupabumi

##### a. Analisis berdasarkan pedoman toponimi

Dari 272 nama desa yang terdapat di Kabupaten Langkat, apabila mengacu pada enam butir pedoman pembakuan nama unsur geografi hanya 68 desa yang benar atau 25%, sedangkan yang masih salah berjumlah 195 dan ditambah dengan 8 desa memakai nama perusahaan dan 1 desa mengikuti nama desa sebelumnya, sehingga totalnya berjumlah 204 atau 75%.

Kesalahan yang mengacu pada pedoman pertama tidak ada, pedoman kedua sebanyak 92 desa, pedoman ketiga sebanyak 5 desa, pedoman keempat hanya 1 desa, pedoman kelima hanya 1 desa, pedoman keenam sebanyak 96 desa.

Sementara terdapat 8 desa memakai nama perusahaan, dalam hal ini nama perkebunan. Dan 1 desa mengikuti nama desa sebelumnya karena pemekaran lalu ditambah dengan kata “baru”, yaitu “Brandan Timur” dimekarkan menjadi “Brandan Timur Baru”.

Kesalahan yang paling dominan terdapat pada pedoman kedua dan keenam. Pedoman kedua, yaitu: nama spesifik, khususnya nama kota, pemukiman dan sebagainya, memuat juga nama generik dalam nama spesifiknya, seperti nama-nama kota memakai gunung, bukit, tanjung, ujung, pulau dan seterusnya dalam nama spesifiknya. Dalam kasus ini nama spesifik tersebut ditulis dalam satu kata. Pedoman keenam, yaitu: nama spesifik terdiri atas empat kata atau lebih ditulis serangkai.

##### b. Analisis kaidah penulisan toponimi rupabumi

Secara baku, nama unsur geografis terdiri atas dua bagian yaitu **nama generik** dan **nama spesifik**. Yang dimaksud dengan nama generik adalah nama yang

menggambarkan bentuk dari unsur geografis tersebut, misalnya sungai, gunung, kota dan unsur lainnya.

Nama spesifik merupakan nama diri (*proper name*) dari nama generik tersebut yang juga digunakan sebagai unit pembeda antarunsur geografis. Nama spesifik yang sering digunakan untuk unsur geografis biasanya berasal dari kata sifat, misalnya 'baru', 'jaya', 'indah', 'makmur' atau kata benda yang bisa mencerminkan bentuk unsur tersebut, misalnya 'batu', 'candi' dan lain sebagainya (Rais, 2005).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008, kaidah penulisan nama geografis secara umum mengikuti kaidah penulisan yang baku dalam bahasa Indonesia. Secara umum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu kaidah penulisan yang berkaitan dengan nama generik dan nama spesifik; dan kaidah penulisan yang berkaitan dengan transformasi dari bahasa daerah dan asing ke bahasa Indonesia. Kaidah penulisan nama geografis yang berkaitan dengan nama generik dan nama spesifik adalah selalu ditulis secara *terpisah* dan dalam *huruf kapital*.

### c. Unsur generik

Dari 272 nama desa yang ditemukan di Kabupaten Langkat, ditemukan 83 desa atau 30.51% yang menggunakan nama unsur generik yang berkaitan dengan unsur geografis. Unsur geografis yang banyak adalah sei atau sungai, tanjung, dan kwala atau kuala. Unsur geografis terkecil yaitu parit, paluh, lubuk, dan pantai. Hal yang menarik dari unsur geografis ini umumnya bersentuhan dan dekat dengan air. Dari 14 daftar nama geografis, terdapat 11 yang bersentuhan dengan air. Hal ini wajar, karena wilayah Kabupaten Langkat merupakan bagian wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Unsur generik

No.	Unsur generik	Jumlah
1.	Teluk	3
2.	Lau	4

3.	Bukit	9
4.	Pulau	6
5.	sei/sungai	15
6.	tanjung/tasik	15
7.	kwala/kuala	13
8.	Paluh	2
9.	Lubuk	2
10.	Padang	4
11.	Parit	2
12.	Gunung	3
13.	Pantai	2
14.	Telaga	3

Berdasarkan tabel di atas ada 83 desa atau 30.51% yang menggunakan nama unsur generik yang berkaitan dengan unsur geografis. Unsur geografis yang banyak adalah sei atau sungai, tanjung, dan kwala atau kuala. Unsur geografis terkecil yaitu parit, paluh, lubuk, dan pantai. Hal yang menarik dari unsur geografis ini umumnya bersentuhan dan dekat dengan air. Misalnya *teluk, lau* (laut), *pulau, sei/sungai, tanjung/tasik, kwala/kuala, paluh, lubuk, parit, pantai, dan telaga*.

### d. Unsur spesifik

Dari 272 nama desa yang ada di Kabupaten Langkat, ditemukan 63 desa atau 23.16% yang menggunakan nama unsur spesifik yang berkaitan dengan kata sifat. Unsur spesifik yang banyak adalah lama, suka, dan jaya. Unsur spesifik lainnya adalah penggunaan nama desa berkaitan dengan mata angin dan penunjuk arah lainnya sebanyak 29 desa. Unsur spesifik berikutnya adalah penggunaan bilangan baik bersifat tulisan, angka, dan huruf ada 12 desa. Pada dasarnya, nama rupabumi tidak boleh ditulis menggunakan angka, kecuali bilangan yang menunjukkan urutan.

Dari 272 nama desa yang ada di Kabupaten Langkat, ditemukan unsur-unsur spesifik yang bersifat kata sifat dalam penamaan desa di daerah tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Unsur Spesifik

No.	Unsur spesifik	Jumlah
-----	----------------	--------

1.	Baru	6
2.	Raya	1
3.	Suka	10
4.	Jaya	9
5.	Lama	13
6.	Kasih	2
7.	Makmur	4
8.	Damai	4
9.	Mulia	2
10.	Terang	1
11.	Ramai	1
12.	Putus	1
13.	Selamat	2
14.	Mekar	1
15.	Cinta	1
16.	Halus	1
17.	Besar	1
18.	Maju	3

Berdasarkan tabel di atas ada 63 desa atau 23.16% yang menggunakan nama unsur spesifik yang berkaitan dengan kata sifat. Unsur spesifik yang banyak adalah *lama*, *suka*, dan *jaya*.

Unsur spesifik lainnya adalah penggunaan nama desa berkaitan dengan mata angin dan penunjuk arah lainnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Unsur Spesifik lainnya

No.	Mata angin dan arah	Jumlah
1.	Barat	4
2.	Timur	4
3.	Selatan	3
4.	Utara	3
5.	Simpang	3
6.	Kanan	1
7.	Tengah	4
8.	Hilir	1
9.	Hulu	1
10.	Seberang	1
11.	Kiri	1
12.	Melintang	1
13.	Ujung	2

Unsur spesifik lainnya adalah penggunaan bilangan baik bersifat tulisan, angka, dan huruf untuk nama desa, serta ada

juga yang menggunakan bahasa daerah seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5. Unsur Spesifik bilangan

No.	Spesifik bilangan	Jumlah
1.	Lima	1
2.	VIII	2
3.	Telu	1
4.	Abc	1
5.	Tiga	1
6.	Dua	2
7.	IV	1
8.	VI	1
9.	I	1
10.	II	1

Pada dasarnya, nama rupabumi tidak boleh ditulis menggunakan angka, kecuali bilangan yang menunjukkan urutan. Sementara itu, nama rupabumi yang berupa kata ulang ditulis penuh sesuai dengan kaidah penulisan kata ulang: dengan tanda hubung (-). Dengan demikian, nama-nama itu seharusnya ditulis *Desa Sanggalima* di Kecamatan Gebang, *Desa Baru Pasartujuh* (bukan Baru Pasar VII) yang terdapat di Kecamatan Hinai, *Desa Perkebunan Bandartelu* (bukan Desa Perkebunan Bandar Telu) yang terdapat di Kecamatan Salapian.

#### e. Kaidah bahasa

Setidaknya ada dua kaidah bahasa yang dapat dijadikan pedoman pembakuan nama rupabumi, yakni kaidah tata tulis (ejaan) dan kaidah tata kata. Kaidah tata tulis dapat mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), sedangkan kaidah tata kata dapat mengacu pada Pedoman Pembentukan Istilah, Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pada dasarnya, semua nama rupabumi alami: baik nama generik maupun nama spesifiknya ditulis dalam dua kata terpisah, masing-masing berawal dengan huruf kapital (besar). Misalnya: Gunung Sitoli, Gunung Kerinci, Tanjung Priok, Tanjung Pinang, Sungai Apit, dan Sungai Siak. Nama-nama

rupabumi alami itu jika digunakan sebagai nama spesifik oleh nama generik rupabumi lain (buatan) ditulis serangkai dalam satu kata. Misalnya: Kota *Gunungsitoli*, Kota *Tanjungpinang*, Kabupaten *Kepulauanmeranti*, dan Kecamatan *Sungaiapit*. Kota, pelabuhan, kabupaten, dan kecamatan adalah nama generik rupabumi, sedangkan *Gunungsitoli*, *Tanjungpinang*, *Kepulauanmeranti*, dan *Sungaiapit* adalah nama spesifiknya.

Berdasarkan kaidah bahasa tersebut pada analisis rupabumi di Kabupaten Langkat ditemukan banyak kesalahan. Umumnya yang terdiri atas dua kata yang bersifat unsur geografis tidak ditulis serangkai. Di antaranya *Desa Teluk Meku*, *Desa Batu Jongjong*, *Desa Lau Damak*, *Desa Sei Musam Kendit*, *Desa Simpang Pulau Rambung*, *Desa Tanjung Lenggang*, *Desa Kwala Musam*, *Desa Sei Baman*, *Desa Sei Musam*, *Desa Sei Serdang*, *Desa Bukit Kubu*, *Desa Bukit Mas*, *Desa Bukit Selamat*, *Desa Kwala Begumit*, *Desa Tanjung Jati*, *Desa Lubuk Kasih*, *Desa Lubuk Kertang*, *Desa Pangkalan Batu*, *Desa Sungai Tualang*, *Desa Tangkahan Durian*, *Desa Bukit Mengkirai*, *Desa Kwala Gebang*, *Desa Padang Langkat*, *Desa Paluh Manis*, *Desa Paya Bengkuang*, *Desa Paya Rengas*, *Desa Tanjung Mulia*, *Desa Parit Bindu*, *Desa Sei Penjara*, *Desa Kwala Pesilam*, *Desa Padang Tualang*, *Desa Tanjung Putus*, *Desa Tanjung Selamat*, *Desa Tebing Tanjung Selamat*, *Desa Bukit Jengkol*, *Desa Pangkalan Siata*, *Desa Paya Tampak*, *Desa Pulau Kampai*, *Desa Pulau Sembilan*, *Desa Sungai Meran*, *Desa Sungai Siur*, *Desa Tanjung Pasir*, *Desa Pematang Tengah*, *Desa Lau Gugur*, *Desa Lau Tepu*, *Desa Pancur Ido*, *Desa Sei Litur Tasik*, *Desa Kwala Besar*, *Desa Pantai Gading*, *Desa Sungai Ular*, *Desa Tanjung Ibus*, *Desa Telaga Jernih*, *Desa Gunung Ambat*, *Desa Kwala Mencirim*, *Desa Tanjung Gunung*, *Desa Sei Bilah Barat*, *Desa Sei Bilah Timur*, *Desa Telaga Said*, *Desa Padang Brahrang*, *Desa Padang Cermin*, *Desa Sei Limbat*, *Desa Tanjung Merahe*, *Desa Tanjung Keriahan*, *Desa Gunung Tinggi*, *Desa Pulau*

*Semikat*, *Desa Kwala Begumit*, *Desa Kwala Bingai*, *Desa Pantai Gemi*, *Desa Kwala Langkat*, *Desa Kwala Serapuh*, *Desa Pantai Cermin*, *Desa Teluk Bakung*, *Desa Bukit Melintang*, dan *Desa Paya Tusam*.

Penyerangkaian nama rupabumi yang digunakan sebagai nama spesifik oleh nama generik rupabumi lain dalam satu kata bermanfaat untuk menghindari penamaan rupabumi yang lebih dari tiga kata. Di Langkat dari 272 desa yang dianalisis, terdapat nama desa seperti berikut ini: *Perkebunan Bukit Lawang*, seharusnya *Perkebunan Bukitlawang*, *Perkebunan Pulau Rambung*, seharusnya *Perkebunan Pulaurambung*, *Paluh Pakih Babussalam*, seharusnya *Paluhpakih Babussalam*, dan masih banyak ditemukan. Apabila tidak diserangkaian dalam satu kata, nama-nama desa itu pasti akan lebih dari tiga kata. Artinya, penulisan nama rupabumi bertentangan dengan salah satu prinsip pembakuan nama rupabumi yang telah ditetapkan, paling banyak tiga kata.

## 5. Penutup

Setiap penamaan suatu unsur geografis harus lengkap mencakup nama generik dan nama spesifik. Ada beberapa pedoman dalam penerapan kaidah toponimi seperti yang telah diatur oleh PBB. Pembakuan secara internasional bertumpu pada pembakuan nasional setiap negara, dan diusahakan menggunakan nama lokal. Penulisan nama rupabumi sesuai dengan kaidah pengejaan, baik nama generik maupun nama spesifik yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi*.

Toponimi adalah kaidah yang digunakan untuk memberi nama suatu tempat atau objek, dimana tempat tidak sebatas wilayah atau pemukiman tetapi semua unsur geografis sehingga setiap unsur memiliki identitas yang pasti dan jelas serta dipahami secara global.

Pembakuan nama geografis diperlukan untuk menciptakan kesepakatan dalam memberikan nama,

identitas atau istilah kepada suatu objek atau unsur geografis sehingga dapat dipahami secara universal.

Diharapkan semua nama unsur rupabumi ini tidak memiliki kesamaan namanya, karena akan mempermudah pihak yang membakukan nama rupa bumi. Apabila terjadi pemekaran desa, seharusnya buatlah nama yang lain, jangan mengikuti nama desa yang sebelumnya dengan cara hanya menambah kata “baru”, atau menambah dengan kata mata angin, atau juga menambah dengan kata bilangan.

Sesuai dengan pedoman pembakuan toponimi rupabumi, seharusnya nama desa tidak boleh memakai nama perusahaan, seperti nama perkebunan.

Perlu adanya pengkajian bersama dengan pihak ahli bahasa untuk menerapkan pembakuan dan membahas beberapa kerancuan dalam penamaan tempat sehingga dicapai kesepakatan nasional yang dapat dijadikan acuan penamaan dan penulisan nama geografis.

#### Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. 2008. *Langkat dalam Sejarah dan Perjuangan Kemerdekaan*. Medan: Mitra Medan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat 2010.
- Canadian Permanent Committee on Geographical Names. 1997. *Principles and Procedures for Geographical Naming*. Ottawa.
- , 1999. *Principles and Procedures for Geographical Naming 1999*. Ottawa.
- Charras, Muriel. 1997. *Dari Hutan Angker Hingga Tumbuhan Dewata. Transmigrasi di Indonesia: Orang Bali di Sulawesi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gouvernementsbesluit No. 50. 1928. *Lijst van de Voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel*. Landsdrukkerij, Weltevreden.
- Indonesia. 1987. *Daftar Pulau-Pulau Indonesia*. Pusat Survei dan Pemetaan ABRI.
- Indonesia. 1992. *Gazetteer Nama-Nama Pulau dan kepulauan di Indonesia*. Bakosurtanal Dokumen No. 26/1992.
- Indonesia. 2003. *Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri.
- Kadmon, N. 2000. *Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names*. Vantage Press. New York.
- Matindas, Rudolf. W. 2013. “Perkembangan Toponimi di Indonesia”. *Makalah “Seminar Nasional Toponim, Hotel Aston Primera, Bandung 25 Juni 2013*. Bandung: Badan Informasi Geospasial.
- New Zealand Geographic Board on Geographical Names. 1991. *Proceedings of South Pacific Place Names Conference*. Wellington Nove,ber 5-7 1990.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Presiden Republik Indonesia. 1972. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmirasi*.
- Rais, Jacob. 2006. “Arti Penting Penamaan Unsur Geografi Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponimi: Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia”. *Makalah*. Jakarta: Bakosurtanal.
- , 2006. *Arti Penting Penamaan Unsur Geografi Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponimi (Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia)*. Bandung: ITB.
- , 2005. *Pedoman Penulisan Nama Unsur Geografi di Indonesia*.
- Raper, P.E. (Ed). 1996. *United Nations Documents on Geographical Names*. Names Research Institute CAUSE. Pretoria.

- Rekky, Saputera. 2010. *“Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak di Kecamatan Ilir Barati Kota Palembang”*, Tesis. Semarang: Program Sudi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sinar, Tengku Luckman. 2011. *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan.
- Soenhadi, Budhy Andono. 2013. “Pembinaan dan Pengembangan SDM di Bidang Informasi Geospasial”. Makalah “Seminar Nasional Toponim, Hotel Aston Primera, Bandung 25 Juni 2013. Bandung: Badan Informasi Geospasial.
- Subowo, Eko. 2013. “Kebijakan Nasional Pembakuan Nama Rupabumi”. Makalah “Seminar Nasional Toponim, Hotel Aston Primera, Bandung 25 Juni 2013. Bandung: Badan Informasi Geospasial.
- Subroto, D. Edi. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: UNS Press.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tichelaar, T.R. (Ed.).1990. *Proceedings of the Workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia*.Bakosurtanal UNGEGN Workshop. Bako Dok. No.07/1990.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations. 1986. *World Cartography Volume XVIII: Standardization on Geographical Names*. UN Publications. New York.
- , 1992. *Sixth UN Conference on the Standardization of Geographical Names. Vol. 1.Report of the Conference*.UN Publications.
- , 1998. *Seventh UN Conference on the Standardization of Geographical Names Vol. I: Report of the Conference*. UN Publications.
- , 1986. *Glossary No. 330/Rev.1: Technical Terminology Employed in the Standardization of Geographical Names (in six languages)* UN Secretariat.
- US Board on Geographic Names. 1997. *Principles, Policies, and Procedures: Domestic Geographic Names*. Department of the Interior. Washington DC.
- US Department of the Interior 1987.*US Geodata: Geographic Names Information System – Data User Guide 6*. USGS.Reston ,Virginia.
- Zuhdi, Susanto. 2013. “Sejarah Sebagai Peningat dan Pemakna”. Makalah “Seminar Nasional Toponim, Hotel Aston Primera, Bandung 25 Juni 2013. Bandung: Badan Informasi Geospasial.